

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat penting bagi pertumbuhan negara Indonesia karena peran besar pajak sebagai pendapatan negara. Pengelolaan pendapatan pemerintah juga memerlukan kearifan (Sudirman et al., 2020). Rakyat secara konsisten memberikan dana kepada negara melalui pajak. Cara terbaik bagi negara untuk mengumpulkan cukup uang untuk membayar semuanya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya, pemerintah dapat menggunakan uang pajak untuk membangun dan memelihara fasilitas dan layanan publik termasuk jalan, angkutan umum, rumah sakit, dan sekolah (Jenni & Trida, 2020). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan negara, dan hal ini dapat dicapai melalui administrasi yang baik dan kemajuan di segala bidang. Meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual bangsa Indonesia merupakan tujuan akhir pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, isu pendanaan pembangunan harus menjadi perhatian utama. Rumui dkk. (2023) menemukan bahwa pajak dapat digunakan untuk mendukung pembangunan demi kepentingan negara. Ada kemungkinan bahwa perpajakan, sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan pemerintah, dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pajak adalah tanggung jawab moneter negara.

Pemilik dan operator kendaraan bermotor wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009. Hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan dikenakan retribusi yang merupakan salah satu komponen pemungutan pajak daerah. Retribusi atau pajak yang diterima setiap daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mendorong pembangunan provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhirnya. Kantor Gabungan Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) setiap kota atau kabupaten bertugas mengelola dan memproses pajak kendaraan bermotor dan retribusi pajak daerah lainnya atas nama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pendapatan dari PKB, pajak

kendaraan bermotor, juga disalurkan oleh Badan Pendapatan Daerah. Tol Kendaraan Bermotor (PKB). Fungsi WP diantaranya adalah untuk menumbuhkan apa yang disebut oleh Norman D. Nowak sebagai “WP awareness”, yaitu “sikap positif, termasuk masyarakat WP, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela” (2020). Dalam kapasitas inilah tingkat penerimaan pajak akan ditentukan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban warga negara untuk dibayar untuk membangun dan menyelenggarakan negara. Semakin besar kesadaran WP terhadap peraturan pajak, semakin besar kemauan mereka untuk membayar pajak. Sebaliknya, dengan menurunnya kesadaran WP, kemungkinan mengabaikan kewajiban perpajakan meningkat (Permata, 2020). Salah satu komponen terkait pemenuhan WP kendaraan bermotor adalah pemahaman bahwa kewajiban perpajakan dapat menjadi tantangan utama. Menurut Adiasa (Wulandari 2020), pemahaman WP tentang regulasi perpajakan merupakan sumber penentuan kepatuhan WP. Wajib pajak yang sangat memahami pajak menunjukkan betapa pentingnya WP pajak untuk pembangunan infrastruktur negara (Aqiila et al., 2021). Seringkali, masyarakat tidak memahami sepenuhnya aturan dan peraturan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan. Untuk menjadikan WP bertanggung jawab atas pajaknya, pemahamannya sangatlah penting. Jika WP mengetahui lebih banyak tentang pajak, mereka akan lebih sadar akan pajak, yang dapat menjamin kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak akan lebih kecil kemungkinannya untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya jika mereka sadar akan pajak, hal ini mungkin terjadi jika mereka belajar lebih banyak tentang pajak (Mulyati & Ismanto, 2021). Berbagai permasalahan muncul karena hampir semua orang di Indonesia memiliki kendaraan bermotor. Yulianti (2021) menemukan bahwa meskipun jumlah penduduk Indonesia besar, hanya sedikit orang yang menyadari tanggung jawab perpajakannya. Karena itu, potensi perpajakan Indonesia cukup besar. Namun ada beberapa pemilik kendaraan bermotor yang menolak membayar pajak karena berbagai alasan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan risiko dan sanksi perpajakan yang lebih tinggi. Akibat kesiapan wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai kebutuhan tanpa melakukan penyidikan secara menyeluruh, memberikan peringatan, melakukan pemeriksaan, atau mengancam sanksi hukum atau administratif, maka target penerimaan

pajak dapat tercapai (Susanto & Arfamaini, 2021). Peningkatan pemungutan pajak merupakan konsekuensi wajar dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena keduanya mempunyai korelasi yang sangat tinggi. Minimnya pengetahuan tentang pajak merupakan dampak dari sosialisasi perpajakan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor. Rasa cinta efektif tanah air yang dimiliki setiap individu mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan upayanya memenuhi kewajiban perpajakan, menurut penelitian Tambun dan Haryati (2022). Apabila wajib pajak secara andal, akurat, dan segera melaporkan kewajiban perpajakannya, maka ia dianggap telah taat hukum. Pajak menghasilkan lebih banyak uang ketika lebih banyak orang membayarnya, dan hal sebaliknya juga terjadi. Masih banyak orang di luar sana yang memiliki mobil tetapi tidak peduli dengan tanggung jawabnya atau memilih mengabaikannya. Karena rendahnya tingkat kepatuhan, banyak masyarakat yang memilih untuk mengabaikan atau menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, pemerintah mungkin akan mengalami penurunan pendapatan pajak dan penurunan kepatuhan pajak secara umum.

Inilah sebabnya mengapa sanksi pajak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya. Penyiksaan dan bentuk hukuman pidana lainnya berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Agar mereka yang tidak membayar pajak mobil secara adil tidak mempunyai kesan bahwa mereka bisa lolos, diperlukan sanksi pajak yang kuat dan.

Jadi, iklim perpajakan yang lebih baik dapat dicapai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan efektifnya penerapan sanksi perpajakan terkait hal tersebut.

Pegawai UKI pemilik mobil menjadi subjek penelitian yang berlangsung di kampus Universitas Kristen Indonesia ini. Mengetahui seberapa baik informasi dan kepatuhan pekerja UKI sebagai wajib pajak kendaraan bermotor menjadi motivasi utama penelitian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berupaya untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Karyawan UKI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, berikut rumusan masalah penelitian:

1. Apa pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap sejauh mana pekerja UKI menaati aturan pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor pekerja UKI terdampak sanksi perpajakan?
3. Apakah kemungkinan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pekerja UKI dalam membayar pajak kendaraan bermotor berhubungan dengan kesadaran wajib pajak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengetahuan dan kesiapan wajib pajak dalam menghadapi kemungkinan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan data asli yang dikumpulkan dari Google Form, penelitian ini mengkaji efisiensi wajib pajak di lingkungan UKI dalam membayar pajak kendaraannya. Melalui penggunaan inspeksi pekerja, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang pengetahuan wajib pajak, sanksi wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji apakah pemahaman pekerja UKI terhadap kewajiban perpajakannya berpengaruh terhadap kepatuhannya terhadap kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Cari tahu apakah pekerja UKI yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor terkena dampak sanksi pajak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perasaan pekerja UKI tentang pembayaran pajak atas kendaraan mereka berdasarkan pengetahuan wajib pajak dan kemungkinan sanksi pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pihak akademik maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat penelitian secara akademis

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi wajib pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah penelitian.

- b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumber berharga bagi para peneliti dalam disiplin ini yang ingin meningkatkan penelitian mereka.

2. Bagi Wajib Pajak

Kami berharap studi ini dapat menjelaskan pentingnya membayar pajak dan konsekuensi yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan begitu, kami berharap wajib pajak dapat membayar pajak mobilnya sesuai ketentuan undang-undang.